ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

CINTHYA APRILIASARI KARTINI



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

CINTHYA APRILIASARI KARTINI A011201083



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

CINTHYA APRILIASARI KARTINI

A011201083

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juli 2024

Pembimbing I

Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM**

NIP. 19740715 200212 1 003

Pembimbing II

Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM®

NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM

NIP. 19740715 200212 1 003

ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh ;

CINTHYA APRILIASARI KARTINI A011201083

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal, 23 Agustus 2024 dan dinyalakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir SE M.Si CWM

NIP 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : CINTHYA APRILIASARI KARTINI

Nomor Pokok

: A011201083

Program Studi

: Ekonomi Pembangunan

Jenjang

: Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Disparitas dan Pola Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 September 2024

Yang Menyatakan

Cinthya Apriliasari Kartini

A011201083

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai syarat pemenuhan untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis berangkat dari masalah disparitas yang terjadi hampir di setiap wilayah terkhusus di provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang terkait dengan tulisan ini agar memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi setiap yang membaca atau bahkan bagi masyarakat luas. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada meraka secara khusus sebagai berikut:

- Allah SWT atas kehendak serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
- 2. Orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Wisnu Murti Irianto dan Ibunda tercinta Dewi Widyawati Mochtar yang telah memotivasi dengan penuh

- 3. kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak henti dipanjatkan untuk anaknya. Yang selalu menguatkan anak perempuan tunggalnya untuk bisa bangkit saat jatuh dan bisa membuat anak perempuannya bisa sampai di titik ini.
- Keluarga besar Mochtar Noors yang tercinta dan terkasih yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dari kecil dalam hal pendidikan dan bertumbuh menjadi perempuan yang kuat dan serba bisa.
- 5. Terima kasih kepada almarhum tante penulis Wiwiek Afrianti Mochtar S.Pd., M.Pd yang telah memberikan motivasi penulis untuk mengikuti jejaknya dalam hal pendidikan dan membangun semangat penulis untuk melanjutkan pendidikan.
- Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- 7. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE.,MA selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis
- 8. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen penasihat penulis dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas segala ilmu, motivasi, arahan, dan bimbingan serta kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ini.
- 9. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, S.E., MS. selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen

- 10. penguji II, terima kasih untuk kritik dan saran yang membangun yang disampaikan pada saat ujian seminar proposal dan ujian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan dari hal tersebut Penulis mendapat pengetahuan-pengetahuan baru.
- 11. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin, serta kepada seluruh jajaran akademisi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi Penulis.
- 12. Teman-teman tersayang saya di "Drama Club" yang awal namanya "Anak Kudapan" (karena sering makan di Kudapan), Ratna Lundini, Nurhikmah, Andi Nuzul Rizky Ramadan, dan Andi Mulia Putri Lestari terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menemani dan mewarnai proses perkuliahan penulis selama di kampus UNHAS. Semoga kita semua di kedepan hari bisa menjadi manusia yang membanggakan bangsa dan negara, membuktikan ke orang-orang yang memandang sebelah mata kalau kita juga bisa jadi orang sukses, semoga kita selalu dikelilingi orang-orang baik aamiinn yaAllah.
- 13. Teman awal perkuliahan penulis yang tergabung dalam grup "Gurls Sesat" Helmi Olpa, Brissa Nestya, dan Andi Mulia Putri Lestari. Terima kasih telah membantu, memberi dukungan, dan tidak membiarkan penulis sedih sendiri dari maba, masuk pengaderan, sampai jadi mahasiswa mandiri. Semoga kita bisa mewujudkan impian-impian yang pernah kita idamkan itu aamiinn yaAllah.

- 14. Teman-teman Rivendell yang selalu menjadi teman berbagi kebersamaan dan membantu selama perkuliahan sebagai mahasiswa dan sukses terus kedepannyaetap jaga kekompakan. tekhusus, Wahida, Eda, Ila, Epa, Aulia, Neri, Unnu, Sudirman, Suntan, Reza, Shadiq, Fiqry, Fachrul, Koko Asher, Khairah, Rifal, Dela, Diza, Vira, Putri, Ihsan, Naufal, serta teman-teman lainnya yang belum tertulis.
- 15. Teman-teman KKN 110 Tematik Perhutanan Sosial di Desa Harapan Barru: Era, Atikah, Mala, Alda, Aswar, dan Arham terima kasih telah menjadi teman-teman yang sabar dan penuh cinta kasih selama berada di lokasi KKN.
- 16. Keluarga besar HIMAJIE FEB-UH terima kasih untuk momen-momen berharga, kesempatan belajar serta pengalaman berkesan dalam Rumah Merah HIMAJIE.
- 17. Terima kasih kepada kak malik, kak yasin, dan teman-temannya yang telah memberikan motivasi dan semangat selama menjalani perkuliahan.
- 18. Kabinet Membara HIMAJIE terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berproses dalam organisasi, serta terima kasih untuk segala pengalaman berharga dan kekompakan selama kepengurusan.
- 19. Untuk Soniya Amelia, sahabat Penulis dari kecil hingga saat ini terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, semangat, dan telah menemani penulis sampai di titik ini. Semoga kita dapat mewujudkan apa yang telah kita rencanakan yah.

20. Teruntuk seseorang yang bernama Bayu Adhitya S.T., terima kasih telah membersamai dan mendukung penulis dari sebelum penulis menulis karya ini sampai penulis dapat menyelesaikannya. Semoga

Allah SWT., selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang

akan dilalui kedepannya.

21. Teruntuk kakak-kakak penulis: kak Nilam, kak Adit, dan kak Yudi yang

telah memotivasi dan menyemangati penulis secara moril untuk

menyelesaikan karya ini.

22. Untuk Penulis, Cinthya Apriliasari Kartini yang nama kecilnya Ayi terima

kasih untuk tetap bertahan sampai saat ini, terima kasih karena telah

menyelesaikan karya ini sampai bisa mendapatkan mewujudkan satu-

satu impian yaitu tambahan nama dibelakang. Tetap bertahan yah,

buktikan kalau dirimu bisa, dan jangan lupakan Allah SWT. Ayoo Ayi

pasti bisa wujudkan impian lain lagi.

23. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Makassar, 24 September 2024

Cinthya Apriliasari Kartini

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cinthya Apriliasari Kartini

Sabir

Nur Dwiana Sari Saudi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disparitas dan pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yakni data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibagi menjadi empat kategori berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita. Kota Makassar termasuk dalam kuadran I sebagai wilayah cepat maju dan tumbuh. Kabupaten Pangkep dan Luwu Timur berada di kuadran II sebagai wilayah maju tetapi tertekan. Kuadran III mencakup kabupaten-kabupaten seperti Bantaeng, Gowa, Sinjai, Barru, dan beberapa lainnya, yang berkembang cepat namun memiliki pendapatan rendah. Sementara itu, kuadran IV meliputi kabupaten-kabupaten seperti Kepulauan Selayar, Bulukumba, dan lainnya, yang tergolong relatif tertinggal dengan pertumbuhan dan pendapatan rendah. Untuk analisis ketimpangan, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori tingkat disparitas level tinggi.

Kata Kunci: Diparitas, Pola Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Williamson, Tipologi Klassen.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DISPARITIES AND PATTERNS OF ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Cinthya Apriliasari Kartini

Sabir

Nur Dwiana Sari Saudi

This study aims to analyze the level of disparities and economic growth patterns in South Sulawesi Province. The data used in this research is secondary quantitative data, namely the Gross Regional Domestic Product at constant prices and the population data published by the Badan Pusat Statistik (BPS) in South Sulawesi Province. The data analysis methods used are the Williamson Index and Klassen Typology. The results show that the regions in South Sulawesi Province are divided into four categories based on economic growth and per capita GRDP. Makassar City is in Quadrant I as a rapidly growing and advancing region. Pangkep and East Luwu Regencies are in Quadrant II as developed but pressured regions. Quadrant III includes regencies such as Bantaeng, Gowa, Sinjai, Barru, and others, which are growing rapidly but have low incomes. Meanwhile, Quadrant IV consists of regencies such as Selayar Islands, Bulukumba, and others, which are relatively underdeveloped with low growth and income. Regarding inequality analysis, South Sulawesi Province falls into the high-level disparity category.

Keywords: Disparities, Economic Growth Patterns, Williamson Index, Klassen Typology.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Disparitas Ekonomi	11
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi	13
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15
2.2 Studi Empiris	16
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	19
BAB III	21
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	21

3.2	2 Jenis	dan Sumber Data	21
3.3	B Metod	de pengumpulan data	21
3.4	Metod	de Analisis Penelitian	21
	3.4.1	Indeks Disparitas Williamson	22
	3.4.2	Analisis Tipologi Klassen	22
3.5	5 Defini	si Operasional	23
BAB IV			25
4.1	Gamb	paran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	25
4.2	2 Gamb	paran Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan	27
4.3	B Hasil (dan pembahasan	29
	4.3.1	Analisis Tipologi Klassen	29
	4.3.2	Analisis Indeks Williamson	34
BAB V			38
5.1	Kesim	npulan	38
5.2	2 Saran	l	39
DAFTAR I	PUSTAK	(A	40
LAMPIRA	N		44

DAFTAR TABEL

	Hala	man
Tabel 1.1	PDRB Per-kapita Kabupaten/Kota Atas Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023	3
Tabel 3.1	Klasifikasi Struktur Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen	23
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023	27
Tabel 4.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023	28
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023 (persen)	28
Tabel 4.4	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Pertahun 2019-2023	33
Tabel 4.5	Hasil Analisis Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023	35

DAFTAR GAMBAR

				Hala	mar
Gambar 2.1	Kerangka Pikir F	Penelitian			20
Gambar 4.1	Grafik Analisi Kabupaten/Kota 2019-2023		•	•	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan khususnya di bidang perekonomian, merupakan prioritas utama dalam seluruh kegiatan pembangunan. Secara konsep sederhana, ukuran tingkat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi adalah perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk yang dimiliki atau pendapatan per kapita. Upaya dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008). Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kapasitas produktif seluruh perekonomian, secara terus menerus atau berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin tinggi. Pertumbuhan pendapatan ekonomi harus dicapai secara inklusif untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan. Dengan cara ini, bidang-bidang yang awalnya tidak efisien akan menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan intensitas yang berbeda-beda akan menimbulkan disparitas ekonomi dan disparitas pendapatan antar daerah (Sirojuzilam, 2008).

Disparitas ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah merupakan masalah besar di negaranegara berkembang seperti Indonesia. Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

kesejahteraan bagi masyarakat luas (Saudi, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil pembangunan. Hal ini mengakibatkan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat (Widodo, 2006).

Disparitas merupakan kondisi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di awal proses pembangunan. Disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi. Disparitas pembangunan merupakan permasalahan disparitas serius yang perlu diatasi baik dalam sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi terencana. Disparitas antar wilayah di Indonesia diperkirakan berdasarkan disparitas pendapatan antar (Indeks Williamson) mencerminkan wilayah vang perbedaan perkembangan ekonomi suatu wilayah (Abipraja, 2002). Adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan ekonomi antar daerah di Indonesia. Faktorfaktor seperti alokasi investasi yang tidak merata, kebijakan pemerintah yang lebih terfokus pada daerah perkotaan, serta perbedaan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi penyebab utama ketidakmerataan ini (Sundrum, 1986).

Ketidakmerataan ekonomi berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan. Wilayah-wilayah yang tertinggal cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah terpencil memperburuk ketidakmerataan ini (Sumarto, Suryahadi, dan Nazara, 2001). Disparitas pembangunan ekonomi terjadi karena banyak faktorfaktor penyebab diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, pemusatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah/daerah, pertambahan stok kapital, jumlah penduduk, dan masih terfokusnya investasi di wilayah tertentu saja dan

juga kualitas infrastruktur yang tidak merata antar wilayah. Disamping itu, keadaan geografis yang berbeda-beda antar daerah juga merupakan masalah yang menyebabkan disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah (Irawan, 2012). Kebijakan desentralisasi yang diterapkan pada awal 2000-an membantu mengurangi beberapa disparitas, tetapi belum cukup efektif. Perbedaan dalam kualitas institusi lokal dan kapasitas pemerintah daerah memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan pembangunan regional (Resosudarmo dan Alisjahbana, 2006). Kebijakan pembangunan regional yang ada juga belum berhasil secara efektif mengurangi disparitas spasial. Perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti transportasi dan listrik serta distribusi anggaran pembangunan menjadi kendala utama dalam usaha mengurangi ketidakmerataan pembangunan (Brodjonegoro dan Azis, 2002).

Tabel 1.1 PDRB Per-kapita Kabupaten/Kota Atas Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019-2023

Kahupatan/Kata	Tahun				
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Selayar	27.446.420	26.411.130	27.255.264	27.952.570	28.669.037
Bulukumba	20.465.617	19.661.934	20.429.738	20.988.773	21.631.932
Bantaeng	29.985.918	28.724.354	30.989.048	35.361.153	36.903.678
Jeneponto	18.379.459	16.673.937	17.417.574	17.876.690	18.014.172
Takalar	22.422.038	21.857.053	22.711.074	23.428.744	23.998.708
Gowa	18.100.161	18.314.313	19.405.166	19.964.055	20.784.164
Sinjai	29.139.374	27.748.904	28.953.235	30.026.302	31.395.513
Maros	39.034.037	31.226.319	31.291.939	33.651.690	34.835.398
Pangkep	51.420.575	48.919.760	50.216.094	52.160.991	54.094.507
Barru	27.576.984	26.235.118	27.349.912	28.548.142	29.349.249
Bone	29.332.912	27.506.146	28.770.681	30.013.897	30.879.211
Soppeng	30.581.365	30.389.681	32.149.977	33.967.696	34.933.533
Wajo	31.960.514	33.524.173	35.596.316	36.183.509	36.453.923
Sidrap	28.278.120	26.254.133	27.520.704	28.601.111	29.280.768
Pinrang	33.892.310	31.749.110	32.976.275	34.018.857	34.313.585

Vahunatan/Vata	Tahun				
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Enrekang	21.923.473	20.394.321	21.451.560	21.916.485	22.097.446
Luwu	26.746.015	26.957.588	28.291.274	29.506.273	30.762.704
Tana Toraja	19.293.306	16.187.276	16.867.697	17.544.990	17.998.072
Luwu Utara	26.243.679	25.308.947	26.048.025	26.908.716	27.955.636
Luwu Timur	54.446.495	54.784.812	53.429.657	53.727.805	58.108.819
Toraja Utara	22.003.185	19.719.748	20.258.548	20.973.828	21.443.566
Makassar	80.511.837	84.913.058	88.057.549	92.141.003	96.358.859
Pare Pare	34.253.562	32.643.773	33.656.065	35.073.824	35.858.103
Palopo	30.030.376	29.629.902	30.863.582	32.157.121	33.044.256

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Pada **Tabel 1.1** terlihat bahwa pada tahun 2023 daerah dengan PDRB Perkapita tertinggi yaitu Kota Makassar, sedangkan nilai PDRB Perkapita terendah yaitu Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan masih belum meratanya pembangunan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga data tersebut mengindikasikan adanya disparitas atau ketimpangan yang terjadi. Dimana tidak semua lapisan masyarakat memiliki pendapatan yang merata. Menurut Razak (2009) hal seperti ini dapat terjadi akibat perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah akan menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan, tercermin dari konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, sehingga biasanya terjadi disparitas antar wilayah yang mencolok.

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp 377162.17 Milyar dan PDRB Perkapita mencapai Rp 40,28 juta. Ekonomi Sulawesi Selatan Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar

terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,12 persen (BPS, 2022). Rasio gini Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 0,377 pada tahun 2022. Artinya, terdapat disparitas yang cukup besar antara penduduk yang berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Angka tersebut menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan pada peringkat tertinggi keempat di Indonesia (BPS, 2022). Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula dilakukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < Cw < 1. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera, meninggalkan wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan tingkat pembangunan yang jauh lebih rendah. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakpuasan sosial dan migrasi internal yang tinggi (Hill, 2008). Pada **Tabel 1.1** juga terlihat bahwa tidak semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (5, 10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan merupakan bukan pertumbuhan ekonomi (Hananai, 2006). Jumlah penduduk juga termasuk dalam faktor yang dapat memengaruhi disparitas ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kemungkinan besarnya permasalahan yang akan terjadi.

Pola pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Ketidakmerataan ini mengurangi daya beli sebagian besar populasi, menghambat permintaan domestik, dan pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi (Barro, 2000). Ketidakmerataan yang ekstrem juga dapat merusak fondasi demokrasi dan ekonomi pasar yang sehat. Ini menciptakan kondisi di mana sebagian besar populasi merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses terhadap peluang yang sama, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas dan inovasi (Stiglitz, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sulawesi Selatan, khususnya di kotakota besar seperti Makassar, tidak dibarengi dengan pembangunan yang merata di daerah-daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan migrasi penduduk dari desa ke kota yang pada gilirannya menyebabkan masalah sosial di perkotaan seperti kepadatan penduduk dan kemiskinan perkotaan (Satria, 2015). Pembangunan yang tidak merata ini juga menciptakan kesenjangan besar antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas, yang membatasi peluang ekonomi dan sosial mereka (Suharto, 2019).

Pada disparitas menekankan bahwa perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan adalah faktor utama yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Individu dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar. Selain itu, latar belakang keluarga juga memainkan peran signifikan dalam menentukan peluang ekonomi, di mana anakanak dari keluarga kaya biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan jaringan yang mendukung karier mereka. Kondisi pasar tenaga kerja juga berpengaruh, di mana teknologi baru dapat meningkatkan permintaan pekerja berkemampuan tinggi dan mengurangi permintaan pekerja berkemampuan rendah. Kebijakan pemerintah, seperti pajak dan transfer pendapatan melalui sistem kesejahteraan, dapat memengaruhi distribusi kekayaan, meskipun kebijakan yang terlalu redistributif dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi. Keberuntungan dan pilihan individu berperan dalam menentukan pendapatan, mencakup kejadian-kejadian acak dalam hidup dan keputusan pribadi tentang pekerjaan dan investasi. Maka dari itu pentingnya menyeimbangkan kebijakan redistributif untuk mengurangi disparitas dengan insentif yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2017).

Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dan tidak terkendali akan menjadikan suatu faktor pendorong ataupun penghambat pembangunan ekonomi. Faktor pendorong tersebut akan menjadikan jumlah tenaga kerja bertambah dan terjadinya perluasan pasar barang dan jasa. Sedangkan sebagai

faktor penghambat dalam pembangunan, dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak akan mengakibatkan produktivitas menurun dan menciptakan pengangguran yang akan menjadikan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan keadaan tersebut akan memicu terjadinya disparitas pendapatan dan kemiskinan (Sukirno, 2015).

Disparitas wilayah pada tahap awal pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya peningkatan jumlah kelompok-kelompok berpenghasilan rendah yang disebabkan oleh adanya migrasi industri dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan disparitas antara kota dengan desa (Kuznets, 1955).

Distribusi pendapatan di beberapa negara ikut dipengaruhi oleh upah minimum di negara tersebut. Akan tetapi, dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan masih menjadi pertanyaan dan juga kontroversi tersendiri. Dalam teori neo-klasik, diungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja yang akan berdampak pada bertambahnya pengangguran sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada semakin meningkatnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Di sisi lain, Keynesian dan yang lainnya menantang kesimpulan ini (Stewart, 2000).

Tingkat PDRB perkapita tahun dasar 2001 signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun 2011 menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan disparitas perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat (Bimbin, 2014).

Perkembangan tingkat disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara antar wilayah Kabupaten/kota selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata angka Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara periode penelitian adalah sebesar 0,277 dengan kriteria disparitas taraf rendah (Ambar, Walewangko, dan Tumangkeng, 2021).

Disparitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik penelitian yang penting dalam ilmu ekonomi. Disparitas ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam berbagai cara, baik positif maupun negatif. Berdasarkan dari pemaparan diatas maka diperlukan suatu penelitian yang dapat menganalisis tingkat disparitas dan pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Seberapa besar tingkat disparitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan?
- Bagaimana klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

 Untuk menganalisis tingkat disparitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Untuk mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah setempat untuk menjadi acuan dalam perumusan kebijakan ekonomi kedepannya.
- Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Disparitas Ekonomi

Menurut Amstrong dan Taylor (2000) ada suatu daerah yang mengalami pertumbuhan output yang rendah tetapi dalam waktu yang bersamaan mengalami pertumbuhan output per tenaga kerja yang tinggi jika ada migrasi keluar dari yang bukan pekerja. Kutipan tersebut memiliki arti bahwa setiap tenaga kerja akan semakin besar beban pekerjaannya (output) ketika tenaga kerja lain yang tidak bekerja harus keluar dari pekerjaan tersebut. Secara umum, ada kecenderungan adanya korelasi yang tinggi antara pertumbuhan output dan pertumbuhan output per kapita tetapi ada hubungan yang lebih rendah antara output per pekerja dan ukuran lainnya. Permasalahannya adalah ukuran mana yang lebih tepat digunakan dalam suatu analisis. Hal ini sangat tergantung pada untuk apa ukuran tersebut digunakan. Pertumbuhan output digunakan sebagai indikator pertumbuhan kapasitas produktif yang tergantung pada faktor apa daerah tersebut lebih menarik dalam bidang modal atau tenaga kerja dibandingkan dengan daerah lainnya. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai suatu indikator perubahan pada tingkat persaingan daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lainnya, sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai suatu indikator perubahan-perubahan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini pendekatan pertumbuhan output per kapita yang digunakan dalam kajian ini yang secara umum dikenal sebagai pendapatan regional per kapita.

Menurut Todaro, upaya untuk menyebarkan pembangunan ekonomi yang lebih merata di negara-negara berkembang akan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan pembangunan cenderung tidak seimbang di suatu wilayah, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Disparitas pendapatan antar daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa kecilnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu di suatu wilayah. Perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh masingmasing penduduk menghasilkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Besarnya perbedaan pendapatan sangat menentukan tingkat pemerataan pendapatan. Disparitas pendapatan biasanya lebih besar di negara-negara sedang berkembang, sementara negara maju, selain memiliki pendapatan tinggi, juga seringkali memiliki tingkat pemerataan yang rendah (Huda et al., 2007).

Menurut Sjafrizal (2017) Disparitas ekonomi antar daerah pada dasarnya terjadi karena struktur dan pola lokasi dan konsentrasi kegiatan ekonomi antar ruang (*spatial economics*) pada suatu daerah. Struktur dan pola tersebut ditentukan oleh distribusi kegiatan ekonomi antar ruang yang sangat dipengaruhi oleh keuntungan lokasi dari masing-masing tempat yang cenderung menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi. Ukuran disparitas ekonomi antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studinya pada pertengahan enam puluhan (Williamson, 1965). Secara Ilmu Statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur disparitas pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi

wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur disparitas pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2017).

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah adalah: Perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2017).

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan membentuk model kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan kegiatan perekonomian, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Arsyad, 2010).

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu: Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya; Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan imobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan; Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer; Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan

disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi; Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian; Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan; Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan dalam struktur produksi dan distribusi input sektor-sektor ekonomi di samping peningkatan output. Dengan demikian, secara umum pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tidak serta-merta disertai dengan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi akan memberikan manfaat utama yaitu terjadinya pertambahan output dan kekayaan suatu masyarakat atau suatu perekonomian sehingga hal tersebut akan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi manusia untuk menguasai dan mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasan dalam mengadakan suatu tindakan tertentu (Irawan, 1992).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno,

2002).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan. Tujuan utama atau tujuan pokok dari sebuah pembangunan ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, maka dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memberi kesempatan untuk pemerintah memenuhi kebutuhan utama rakyatnya, tetapi sejauh mana kebutuhan ini dapat dipenuhi tergantung kepada kemampuan pemerintah dalam menyebarkan sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat untuk memperlebar kesempatan kerja (Hasan, dkk., 2018).

Pertumbuhan ekonomi dikatakan berhasil melakukan perbaikan pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu menambah kesempatan kerja dan juga menaikkan produktivitas. Dengan bertambahnya kesempatan kerja, maka rakyat memperoleh cara untuk menambah penghasilan. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja akan menentukan spesialisasi guna menaikkan produktivitas sehingga distribusi pendapatan semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat untuk beberapa generasi berikutnya (Lubis, 2017). Negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah akan tumbuh lebih cepat daripada negara-negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan ada konvergensi atau pendekatan dalam tingkat pendapatan mereka (Solow, 1956).

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah atau jumlah nilai barang dan produk akhir

yang diciptakan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin baik pula kinerja perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro dan Smith, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

2.2 Studi Empiris

Bagian ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Kuznets (1955) pada penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat disparitas wilayah pada tahap awal pembangunan ekonomi suatu negara dan pada saat tahapan berikutnya akan membaik. Kuznets juga mengemukakan hipotesa yang disebut "U- terbalik" atau disebut juga kurva kuznets yaitu sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan kemerataan pembagian pendapatan disuatu negara.

Stewart (2000) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa distribusi

pendapatan di beberapa negara ikut dipengaruhi oleh upah minimum di negara tersebut. Akan tetapi, dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan masih menjadi pertanyaan dan juga kontroversi tersendiri. Dalam teori neo-klasik, diungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja yang akan berdampak pada bertambahnya pengangguran sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada semakin meningkatnya tingkat kemiskinan dan disparitas. Di sisi lain, Keynesian dan yang lainnya menantang kesimpulan ini.

Sutawijaya (2004) pada penelitiannya menggunakan analisis Tipologi Klassen dan menghasilkan pada Pulau Sumatera, kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh kecenderungan berada di Kota Provinsi dan sebagian di kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang dimanfaatkan secara maksimal seperti, pertambangan dan perdagangan dengan disparitas pendapatan antar daerah tidak akan dihilangkan sama sekali karena tiap daerah mempunyai potensi sumber daya dan keadaan sarana dan prasarana (jalan, transportasi darat, pelabuhan laut maupun udara, jaringan telekomunikasi dan lain-lain) yang berbeda-beda namun begitu nilainya sebaiknya terus ditekan agar suatu daerah mempunyai disparitas pendapatan taraf rendah karena disparitas pendapatan merupakan sumber pemicu dari disintegrasi suatu daerah maupun bangsa.

Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menunjukkan bahwa disparitas pendapatan regional dapat secara signifikan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih rendah dalam modal manusia dan infrastruktur, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Umiyati (2014) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa Masalah disparitas pembangunan antar daerah tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau Sumatera. Salah satu contohnya adalah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki angka indeks disparitas pembangunan yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena propinsi ini merupakan salah satu dari pemekaran Provinsi Riau.

Bimbin (2014) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat PDRB perkapita tahun dasar 2001 signifikan mempengaruhi PDRB perkapita tahun 2011 menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan disparitas perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat.

Wibowo & Wiryono (2017) pada penelitiannya menemukan bahwa disparitas ekonomi antar daerah di Indonesia cenderung meningkat, dengan fokus pada perbedaan pertumbuhan PDRB antar provinsi. Indeks Williamson mengungkapkan adanya peningkatan ketimpangan terutama antara daerah metropolitan dan daerah non-metropolitan.

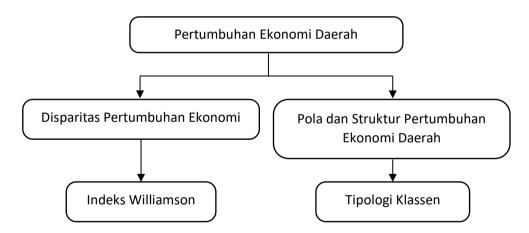
Sulasmi dan Siregar (2020) pada penelitiannya menggunakan metode analisis yaitu Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Kabupaten Aceh Barat. Hasil klasifikasi Tipologi Klassen menjelaskan Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Lhokseumawe merupakan daerah cepat tumbuh dan cepat maju. Sementara itu

Simeulue, Aceh Jaya, Singkil, Bener Meriah, dan Pidie Jaya merupakan daerah yang relatif tertinggal.

Hasanah & Hadi (2021) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi antara daerah pusat dan pinggiran semakin melebar berdasarkan data PDRB. Pada penerapannya Indeks Williamson menunjukkan adanya disparitas yang meningkat dalam hal pertumbuhan ekonomi antara daerah dengan PDRB tinggi dan rendah.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan adil. Kebijakan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan optimalisasi potensi dan sumber daya yang tersedia. Proses dimulai dengan mengukur pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2 masalah yaitu mengukur tingkat disparitas dan melihat pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, dianalisis disparitas atau ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut menggunakan Indeks Williamson, yang mengidentifikasi tingkat disparitas ekonomi. Indeks Williamson yang bernilai antara 0 - 1, dimana semakin besar Indeks Williamson maka semakin besar juga terjadinya disparitas pendapatan antar daerah begitupun sebaliknya jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nilai 0, maka semakin merata pendapatan pada suatu daerah tersebut. Berdasarkan hasil indeks ini, disparitas ekonomi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Sementara itu, pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah juga dianalisis menggunakan Tipologi Klasen, yang membantu mengkategorikan daerah berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan analisis ini, daerah kemudian diklasifikasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Tipologi Klassen membagi daerah menjadi empat kuadran, yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (Kuadran II), daerah berkembang cepat (Kuadran II), daerah relatif tertinggal (Kuadran III), dan daerah maju tapi tertekan (Kuadran IV). Hasil dari kedua analisis ini, baik dari segi disparitas maupun pola struktur pertumbuhan ekonomi, digunakan untuk merumuskan implikasi kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan di seluruh daerah. Alur ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berbasis data dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan dan efektif. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian